

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era modern seperti yang hadir saat ini sebagai era revolusi industry 4.0. Perkembangan era revolusi saat ini menggunakan basis teknologi dan informasi dalam setiap aspeknya. Kehadiran teknologi menjadi titik tumpu dalam kegiatan di era digital khususnya dalam rangka menjadikan suatu entitas untuk memanajemen kehidupan untuk tetap terintegrasi. Kehidupan manusia yang semakin serba digital juga kemudian menuntut kehidupan masyarakat di setiap bidangnya untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Selain itu, hadirnya pandemic Covid-19 sebagai bencana yang melanda dunia sempat melumpuhkan roda kehidupan khususnya di Indonesia.

Keterpurukan yang ada menjadikan seluruh pihak harus bekerja sama untuk Kembali bangkit. Covid-19 yang sudah menyebar keseluruh penjuru dunia dengan cepat menghadirkan fenomena digitalisasi atau transformasi digital. Pemerintah saat ini harus selalu aktif dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kembali bangkitnya kehidupan di Indonesia. Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk terlaksanya roda pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya kolaborasi dengan *stakeholders*. Kerjasama ini biasa disebut dengan istilah *collaborative governance*. *Collaborative governance* hadir sebagai konsep baru agar adanya kesinambungan

antara lembaga publik yang terjadi pada pemerintah dengan *stakeholders* terkait (Bila dan Saputra 2019).

Konsep *collaborative governance* didefinisikan sebagai model kerjasama yang melibatkan aktor-aktor *non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif dalam konteks pembuatan ataupun pelaksanaan kebijakan publik (Chotimah, Iswardhana, dan Rizky 2022). Konsep yang dibawa oleh *collaborative governance* terfokus pada pemecahan masalah terhadap isu yang terjadi di ruang publik yang kemudian menggandeng *stakeholders* untuk menjalin sebuah kerja sama. Ruang lingkup kerja sama yang dijalin dalam *collaborative governance* ini merupakan berupa sebuah interaksi yang bertujuan untuk mencari jalan tengah sebagai solusi dari permasalahan yang ada.

Kaitannya dengan ekonomi digital, digitalisasi ekonomi menjadi sesuatu yang diperhatikan dan diupayakan oleh berbagai lembaga dan *stakeholders* ketika hadirnya pandemic karena pandemic memberikan dampak yang luar biasa pada bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang terdampak bisa bersumber dari pariwisata, transportasi publik, dan bidang lain karena tidak diperbolehkan terjadinya interaksi secara langsung dalam rangka memutus rantai persebaran virus pada saat itu. Dikembangkannya pariwisata, teori kolaborasi sangat sesuai dalam suatu implementasi dari *collaborative governance* dan dalam prosesnya akan terlihat suatu keberhasilan di dalam kolaborasi yang dijalankan (Rachmadani and Eka 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal menaungi urusan pariwisata memiliki dinas yang dinamakan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdirinya dinas ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. (<http://visitingjogja.com/>).

Industri pariwisata terus mengalami perkembangan baik dari segi teknologi, transportasi, dan informasi yang ditandai dengan terus bertambahnya jumlah destinasi wisata yang ada di Indonesia maupun negara lainnya (Chotimah et al. 2022). Demi menghadapi perkembangan, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengembangkan ekonomi digital juga telah mengimplementasikan *collaborative governance*. Namun demikian, implementasi *collaborative governance* tersebut masih terdapat kelemahan yang harus terus dikaji supaya ke depannya implementasi suatu *collaborative governance* mampu berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut para ahli, faktor-faktor yang berkemungkinan mempengaruhi implementasi *collaborative governance* dalam membangun ekonomi digital itu antara lain kepemimpinan, sumberdaya manusia, infrastruktur. Menurut (Syawal dan Samuda

2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam *collaborative governance* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan aksi bersama. Kepemimpinan dalam kolaborasi lebih mengarah pada bentuk jaringan bukan berbentuk hierarki. Dengan demikian setiap *stakeholders* berada pada posisi sama. Selain kepemimpinan, sumber daya manusia dan infrastruktur memiliki keterkaitan kepada implementasi suatu *collaborative governance* khususnya dalam kasus ekonomi digital yang menjadi fokus perhatian tahun ini. Pemerintah akan selalu menjaga sumber daya masyarakat dengan berbagai pendekatannya sebagai upaya dari implementasi *collaborative governance* (Saputra 2020). Di antara banyaknya aktor yang terlibat di dalam kolaborasi, yang mana salah satunya adalah kolaborasi dengan *stakeholders*.

1.2. Rumusan Masalah

Seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi *collaborative governance* Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholders* dalam pengembangan ekonomi digital tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi *collaborative governance* dalam kasus kolaborasi Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholders* dalam pengembangan ekonomi digital tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam dunia Ilmu Pengetahuan dalam perkembangannya, terkhusus dalam ruang lingkup yang terkait dengan implementasi *collaborative governance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat kebijakan dan meningkatkan kualitas kinerja dalam hal kepemimpinan, sumberdaya manusia dan infrastruktur dalam upaya peningkatan implementasi *collaborative governance*.

1.5. Kajian Pustaka (Literature Review)

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan implementasi *collaborative governance* di Indonesia dapat dipetakan/dikategorikan/ diklasifikasikan (taksonomi) sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Kajian Pustaka

No.	Judul	Penulis	Isi
1.	<i>Collaborative Governancae</i> dalam Implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang	(Hudaya and Dewi 2021)	Konsep <i>collaborative governance</i> diimplementasikan oleh Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang melalui ProKlim yang berhasil meraih ProKlim kategori utama pada 2020 yang kemudian dikategorikan sebagai suatu proses kolaborasi yang baik.
2.	Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam Implementasi Kebijakan PSBB pada Penanganan Pandemi Covid-10 di DKI Jakarta Tahun 2020	(Putri Khasanah and Purwaningsih 2021)	Implementasi dari aspek kolaborasi terkait dengan <i>Collaborative Governance</i> dibagi ke dalam kolaborasi antarinstansi yang terlibat dan kolaborasi pada Bansos PSBB dan KSBB. Implementasi PSBB tersebut hareus menerapkan pendekatan dari konsep <i>collaborative governance</i> dalam segala aspeknya khususnya terkait kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan.
3.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Perspektif Administrasi Publik	(Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono 2020)	<i>Collaborative governance</i> di dalam implementasinya dalam advokasi pemberian ASI Eksklusif di Kota

			<p>Semarang melibatkan 3 pemangku kepentingan yang terlibat secara intensif. Akademisi dan organisasi privat dalam implementasinya tidak terlalu instens dalam melaksanakan perannya sehingga tidak optimal program tersebut. Kolaborasi antar lembaga terkait melalui <i>collaborative governance</i> perlu dilakukan sesuai dengan peran masing-masing.</p>
4.	<p>Pengaruh dan Strategi Manajemen Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Tahun 2019 (Pengembangan Goa Kiskendo Jatimulyo, Kulon Progo)</p>	<p>(Rachmadani and Eka 2020)</p>	<p>Implementasi kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sudah cukup baik tetapi di dalam peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya masih kurang. Faktor insfrastruktur memiliki pengaruh di dalam implementasi kolaborasi tersebut. Era digitalisasi saat ini menjadikan pengelola untuk menerapkan kolaborasi pemerintah dan mansyarakat dalam pemanfaatan teknologi yang akan digunakan.</p>
5.	<p>Pengaruh Infrastuktur Riset, Pendanaan Riset dan Kolaborasi Riset terhadap Kinerja Penelitian di Universitas Trunojoyo Madura</p>	<p>(Qomaruddin and Sundjoto 2021)</p>	<p>Infrastruktur memiliki pengaruh positif dan secara signifikan akan kinerja suatu penelitian, kolaborasi riset juga memiliki pengaru baik dan signifikan.</p>

6.	Implementasi Model <i>Collaborative Governance</i> dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19	(Anang Sugeng Cahyono 2021)	Konsep <i>collaborative governance</i> memiliki makna dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi kepada kepala pemerintahan bersama semua jajaran kaitannya dengan semua kepala pemerintah daerah dan beberapa sektor.
7.	<i>Collaborative Governance</i> melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang	(Yunas and Nailufar 2019)	Konsep <i>collaborative governance</i> sukses diimplementasikan melalui program Kampung KB dengan harapan kualitas hidup di kampung akan meningkat. Indikator keberhasilan program tersebut adanya beberapa faktor seperti akseptor KB baru meningkat, Kesehatan ibu hamil dan menyusui yang terlayani, dan lain sebagainya. Kondisi yang hadir di dalam penelitian ini dapat menghasilkan beberapa formulasi kebijakan dengan konsep <i>collaborative governance</i> .
8.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	(Tika Mutiarawati dan Sudarmo 2021)	Kolaborasi dilaksanakan dalam menangani permasalahan banjir rob di Kelurahan Bandengan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan, Dinas

			Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, dan berbagai <i>stakeholders</i> lain yang terlibat dengan melaksanakan peran masing-masing.
9.	Pengaruh <i>Digital Leadership</i> dan <i>Digital Collaboration</i> terhadap <i>Digital Skill</i> Semasa Covid-19	(Saputra and Nugroho 2021)	<i>Digital skill</i> menjadi suatu hal yang penting karena bisa menentukan produktivitas pegawai baik pada perusahaan swasta maupun sektor publik. Berdasarkan teori, pengembangan dalam <i>digital skill</i> bisa dipengaruhi dwari 2 arah yaitu vertical dan horizontal. Dalam memberikan dukungan kolaborasi secara digital untuk lebih maksimal, kepemimpinan supervisor menghadirkan aturan untuk bekerja dari rumah. Berbagai faktor memberikan pengaruh di dalam memperkuat dukungan kolaborasi yang dihadirkan.
10.	<i>Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial</i>	(Fuadi, Sadikin, and Saripah 2021)	Kolaborasi dengan BUMDes dengan UMKM <i>GoDigital</i> yang menjadi salah satu dari banyaknya strategi yang diformulasikan. Pemberdayaan melalui aksi sosial memiliki tujuan dalam aspek kemandirian yang

			diperuntukkan pelaku usaha dengan pendekatan basis partisipasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam pendampingan UMKM.
11.	Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai	(Andayani and Tirtayasa 2019)	Kepemimpinan dalam organisasi mengarah kepada seberapa besar orang-orang yang dipimpin untuk melakukan arahan pemimpinnya. Kepemimpinan dalam hal ini memiliki beberapa pengaruh positif terhadap kepribadian, karakteristik, harapan, perilaku dan lain sebagainya.
12.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy	(Pujanira and Taman 2017)	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Dalam hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

13	Peran Ekonomi Digital Terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19	(Nizar and Sholeh 2021)	<p>Penelitian ini menunjukkan ekonomi digital merupakan sektor ekonomi yang akan terus berkembang pesat di masa yang akan datang. Perlu adanya ketersediaan database ekonomi digital yang lengkap dan dapat diakses oleh peneliti, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran, pada gilirannya ekonomi digital mampu berperan sebagai business resilience dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.</p>
14	Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial	(Kurniawati, Zuhroh, and Malik 2021)	<p>Transaksi keuangan digital di Indonesia terus menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, dengan peningkatan tajam di 3 tahun terakhir. QRIS adalah standar QR Code yang dibuat Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, maupun mobile banking.</p>

15	Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi	(Silalahi, Tambunan, and Batubara 2022)	Perubahan alat transaksi berupa alat pembayaran digital yang sangat membantu dan mempercepat proses pembayaran serta membantu mengurangi kontak fisik sebagai bentuk pengurangan penyebaran virus Covid-19. QRIS adalah Indonesian Quick Response Code Standard yang merupakan standar nasional QR code sebagai media pembayaran QR code di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia.
----	--	---	---

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Implementasi dari *collaborative governance* yang dihadirkan berbeda dan kaitannya dengan hal-hal yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan mengkaji terkait pengaruh kepemimpinan, sumber daya manusia, dan infrastruktur terhadap implementasi *collaborative governance* dengan studi kasus kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholders* dalam pemerintahan digital pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pengaruh kepemimpinan, sumberdaya manusia, dan infrastruktur terhadap implementasi *collaborative governance*: studi kasus kolaborasi dinas pariwisata

pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan *stakeholders* dalam pengembangan ekonomi digital tahun 2022.

1.6. Kerangka Teoritik (Theoretical Framework)

1.6.1. Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital (*Collaborative Governance*)

Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Secara prinsip, collaborative (kolaborasi) berbeda dengan network (jaringan) dan partnership (kemitraan). Ada nilai dasar tersendiri yang melekat (Dewi 2019). Adapun beberapa indikator implementasi *collaborative governance* yang penulis ambil dari beberapa teori yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Instansi pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Implementasi tata kelola pemerintahan digital pada penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk dari tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga memiliki dampak pada penerapan digitalisasi teknologi (Riswati 2021).

- b. Organisasi non-pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Public value menjadi indikator sebagai pendekatan dalam manfaatnya dan model kesuksesan informasi yang diperbaharui akan menjadi suatu parameter keberhasilan dari segi digital di dalam pemerintahan tersebut yang

kemudian pemahaman masyarakat akan menjadi model kesuksesan akan suatu sistem informasi oleh pemerintahan digital (Sorongan and Hidayati 2019).

- c. Organisasi non-pemerintah punya andil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi ini yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Dalam implementasi suatu pemerintahan digital, indikator untuk parameter berhasil atau tidaknya implementasi tersebut berdasarkan dari penerima dari program atau pengguna yang mana di dalam kasus ini adalah kepuasan dari masyarakat dan penggunaan tetap sifatnya wajib (Sudarsono and Lestari 2018).

- d. Orientasi pemecahan masalah publik dalam kolaborasi ini yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintah dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, transparan, inovatif, dan partisipatif (Rutanaji, Kusumawardani, and Winarno 2018).

- e. Teknologi informasi digunakan dalam kolaborasi ini yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Sistem digital dari tata kelola pemerintahan daerah adalah tata kelola pemerintahan daerah yang mengimplmentasikan sistem digital dalam penyelenggaraan roda pemerintahnya (Riswati 2021).

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya, sebagai tanggung jawab utama dari pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah memberikan pelayanan kepada publik dengan sistem digitalnya seperti adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), LKPP, *e-catalogue*, sistem OSS, dan masih banyak pemerintahan digital lain yang diimplementasikan (Riris Katharina 2020).

1.6.2. Kepemimpinan (X1)

Kepemimpinan adalah suatu kapabilitas dan seni di dalam memberikan pengaruh kepada orang lain, bawahan atau kelompok dan kemampuan dalam memberikan arahan dalam tingkah laku bawahan atau kelompok tersebut (Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, S.E. 2021). Adapun beberapa indikator implementasi kepemimpinan yang penulis ambil dari beberapa teori yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Kemampuan merencanakan pekerjaan dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Ada pengaruh yang kuat antara kepemimpinan dari pemerintahan di desa dengan optimalisasi pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebuah pembangunan (Latif, Mustanir, and Irwan 2019).

- b. Kemampuan pengarahan dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan

perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan (Lumenta, Sepang, and Tawas 2019).

- c. Kemampuan menyelesaikan masalah dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Pemimpin yang menghargai setiap eksperimentasi dengan mengusahakan ide-ide dan gagasan-gagasan baru, serta melaksanakan perubahan merupakan pemimpin yang dapat mendorong cara-cara terbaru dalam menyelesaikan masalah, melahirkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan mendorong serta menggerakkan para anggota organisasi melakukan perubahan (Pertiwi and Atmaja 2021).

1.6.3. Sumber Daya Manusia (X2)

Sumber daya manusia merupakan salah satu individu yang bisa dikatakan sentral dalam sebuah instansi, organisasi, atau kelompok apapun dengan kejelasan struktur organisasi dan tujuan. Adapun beberapa indikator implementasi sumberdaya manusia yang penulis ambil dari beberapa teori yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Pelatihan kolaborasi dengan *stakeholders* dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Pengertian manajemen SDM dari perspektif kebijakan adalah sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh Institusi/Organisasi dengan mengintegrasikan semua unsur yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas hasil kerja yang baik dan juga

meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi (Awang Darumurti, Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Vindhi Putri Pratiwi 2021).

- b. Kemampuan melakukan interaksi dengan *stakeholders* dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Mondy dan Martocchio menyebutkan sumber daya manusia merupakan individu yang ada di dalamnya suatu organisasi di mana individu atau pegawai yang dikelola bertujuan untuk memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaannya (Ni kadek 2019).

- c. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Teknologi canggih tidak akan banyak berarti jika tanpa diimbangi dengan pegawai yang mampu mengoperasikan secara baik. Oleh karena itu, birokrasi memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Rohida 2018).

1.6.4. Infrastruktur (X3)

Infrastruktur menjadi salah satu hal penting di dalam mempengaruhi pembangunan yang berkesinambungan dengan rencana pembangunan nasional yang mana kuantitas dan kualitasnya dibenahi dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi terwujudnya suatu kesinambungan di dalam pemerintah (Posumah 2017). Adapun beberapa indikator implementasi infrastruktur yang penulis ambil dari beberapa teori yang berbeda, sebagai berikut:

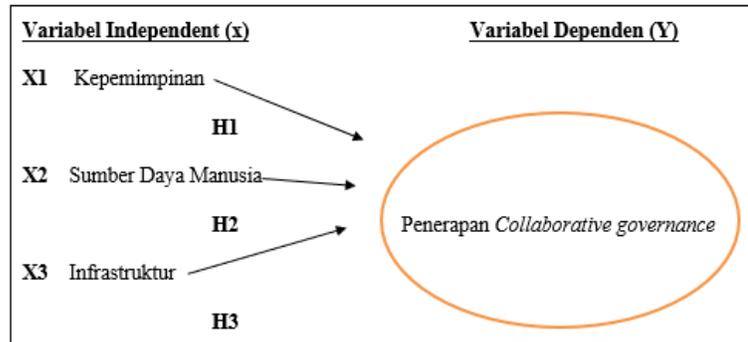
- a. Kelengkapan *hardware* dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Agar suatu sistem yang dikomputerisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mendukung, salah satunya yaitu kapasitas dan kelengkapan hardware (perangkat keras) yang memadai untuk menangani semua tingkat transaksi dan kebutuhan pemrosesan (Mutiarni 2017).

- b. Kelengkapan jaringan internet dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Aktor utama pada masa ini adalah individu-individu dan kelompok-kelompok kecil terkonvergensi dengan internet dan saling terhubung di dunia digital. Pada era ini setiap individu bisa dengan mudah memperoleh informasi sekaligus juga dapat menjadi narasumber melalui jaringan internet (Pujianto, Mulyati, and Novaria 2018).

Gambar 1. 1
Kerangka Teoritik



Keterangan:

- X1 adalah variable independent ke-1
- X2 adalah variable independent ke-2
- X3 adalah variable independent ke-3
- Mempengaruhi Y
- Y adalah variable dependen
- H adalah hipotesis

1.7. Hipotesa

H1: Kepemimpinan mempengaruhi implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

H2: Sumberdaya manusia mempengaruhi implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

H3: Infrastruktur mempengaruhi implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

1.8. Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1. Definisi Konseptual

a. Implementasi *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Ekonomi Digital dengan Penggunaan QRis

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan digital menjadi suatu kebutuhan utama di era reformasi saat ini. Implementasi tata kelola pemerintahan digital sudah menjadi suatu tujuan utama dalam pemerintahan yang baik. Konsep implementasi tata kelola pemerintahan digital sudah menjadi suatu poin penting karena berbagai regulasi dihadirkan untuk menjadi pedoman berjalannya implementasi tata kelola pemerintahan digital.

b. Kepemimpinan dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kapabilitas dan seni di dalam memberikan pengaruh kepada orang lain, bawahan atau kelompok dan kemampuan dalam memberikan arahan. Kepemimpinan memiliki keterkaitan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang ada di dalam diri seseorang yang bukan merupakan seorang pemimpin.

c. Sumber Daya Manusia dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Dari beberapa pendapat di atas mengenai sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sentral dalam melakukan perencanaan dan hal secara public dan memiliki peraturan yang jelas di suatu tempat yang memiliki struktur yang jelas terutama dalam hal spesifikasi sumber daya manusia di dalamnya. Kemudian SDM merupakan suatu individu yang hadir pada suatu organisasi di mana individu atau pegawai tersebut bertujuan untuk memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaannya.

d. Infrastruktur dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur menjadi salah satu hal yang berpengaruh pada pembangunan yang berkesinambungan dengan rencana pembangunan nasional yang mana kuantitas dan kualitasnya dibenahi dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi terwujudnya suatu kesinambungan di dalam pemerintah.

1.8.2. Definisi Operasional

1.8.2.1 Indikator Keberhasilan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk beberapa indikator mengenai pengaruh kepemimpinan, sumberdaya manusia, dan infrastruktur terhadap implementasi *collaborative governance*. Kerangka operasional sebagai berikut:

a. Indikator Keberhasilan Implementasi *Collaborative Governance*

1. Instansi pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
2. Organisasi non-pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
3. Organisasi nonpemerintah punya andil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi ini dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
4. Orientasi pemecahan masalah publik dalam kolaborasi ini dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
5. Teknologi informasi digunakan untuk kolaborasi ini dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

b. Indikator Keberhasilan Kepemimpinan

1. Kemampuan merencanakan pekerjaan dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

2. Kemampuan pengarahan dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
 3. Kemampuan menyelesaikan masalah dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
- c. Indikator Keberhasilan Sumber Daya Manusia
1. Pelatihan kolaborasi dengan *stakeholders* dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
 2. Kemampuan melakukan interaksi dengan *stakeholders* dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
 3. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
- d. Indikator Keberhasilan Infrastruktur
1. Kelengkapan *hardware* dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis
 2. Kelengkapan jaringan internet dalam kolaborasi yaitu berupa pengembangan ekonomi digital dengan penggunaan QRis

1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan tingkat pengaruh kepemimpinan, sumberdaya, manusia dan infrastruktur terhadap implementasi pemerintahan digital, maka penelitian

ini bertipe sebagai penelitian survey. Menurut (Pinsonneault & Kraemer, 1993) dalam (Fitriyani, Fauzi, dan Sari 2020) bahwa penelitian survey dipandang sebagai metode untuk menggambarkan secara kuantitatif aspek-aspek spesifik dari populasi tertentu sehingga pengumpulan datanya dilakukan kepada sekelompok orang yang hasilnya dapat digeneralisasi kembali ke dalam suatu populasi tertentu.

1.9.2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut (Nurjaya et al. 2021), populasi merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi merupakan seluruh pegawai yang mengimplementasikan pengembangan ekonomi digital di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta dan *Stakeholder* terkait pada tahun 2022. Terdapat 2 *stakeholders* terkait yaitu Bank BPD DIY Cabang Utama dan wisatawan yang datang ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut informasi dari Dinas Pariwisata Provisnis Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah pegawai yaitu 74 orang, pegawai Bank BPD DIY Cabang Utama berjumlah 113 orang dan wisatwan yang berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2021 sebanyak 4.294.725 orang (data diambil dari statistik kepariwisataan tahun 2021).

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik penelitian yang terdapat di dalam populasi di dalam penelitian ini (Umiyati 2021). Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *simple random sampling* merupakan suatu teknik mengambil sampel dari populasi yang dilakukan secara acak. Teknik ini digunakan karena sifat populasinya homogen, yaitu khusus para pegawai yang mengimplementasikan pengembangan ekonomi digital. Supaya lebih representatif, populasi yang berjumlah 4.294.912 dari data yang diperoleh dari pihak terkait kemudian diolah menggunakan rumus solvin dan diperoleh jumlah 100`responden (sampel).

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : persen ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample perhitungan pengambilan sample menggunakan 10%.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{4.294.912}{1+4.294.912(0,01)}$$

$$n = \frac{4.294.912}{1+42.949,12} = 99,99 = 100 \text{ orang}$$

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2017), kuesioner (angket) adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data dengan prosedur menyebarkan susunan pertanyaan tertulis kepada responden yang sudah disesuaikan oleh penulis untuk dijawab oleh responden (Vista Yuliantika 2018). Jadi penelitian ini menyebarkan kuesioer kepada pihak terkait yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner dibuat dalam bentuk google form. Peneliti menyebar google form itu kepada 100 orang yang terdiri dari 33 pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 33 Pegawai Bank BPD DIY Cabang Utama dan 34 wisatawan yang datang ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengimplementasikan pengembangan ekonomi digital.

Peneliti melengkapi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti mendapatkan dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan lain-lain yang berkaitan dengan implementasi pengembangan ekonomi digital (*collaborative governance*).

1.9.4. Instrumen dan Pengukuran Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa kuisioner tertutup dengan pernyataan atau pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan memilih kolom yang sudah disediakan oleh peneliti (Kusuma, Basiran, and Soraya 2021).

Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk pengukuran datanya. Menurut Sugiyono, skala *Likert* adalah skala yang digunakan dalam mengukur sikap, pendapat responden terkait suatu fenomena sosial (Kusuma et al. 2021). Skala Likert digunakan untuk menentukan pendapat responden, yaitu sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, netral dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1.

Outer Model (*Measurement Model*) Hasil uji Outer Model langkah pertama adalah untuk menguji validitas dengan *Convergent validity*, *Discriminant Validity*, *Composite reliability*, *Average Variance Extracted (AVE)*. Inner Model (*Structural Model*) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif. Beberapa tes untuk model struktural adalah R Square serta Uji t dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Bisnis et al. 2017).

1.9.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik analisa data merupakan suatu proses yang digunakan dalam memberikan perhitungan jawaban rumusan masalah dan uji hipotesis yang dilakukan di dalam penelitian. Kemudian Sugiyono juga menjelaskan bahwa pencarian data merupakan salah satu teknis dalam analisis data, penyusunan sistematis data yang didapatkand dari hasil wawancara, catatan lapangan dan berbagai dokumentasi yang menjelaskan data di dalam beberapa kategori yang kemudian dalam Menyusun pola dengan tujuan menentukan suatu data krusial yang harus dipelajari hingga sampai penyimpulan data untuk mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis data. SEM-PLS adalah aplikasi yang menggunakan Smart PLS dengan komputer hanya memberikan izin model hubungan antarvariabel yang recusif atau sama dengan model analisis jalur yang tidak sama dengan SEM dengan dasar kovarian yang memperbolehkan terjadinya hubungan timbal-balik (Sarwono 2017). SEM-PLS (*Structural Equation Modeling*) dalam penelitian ini untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji regresi dan hipotesis.

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument penelitian dalam mengukur apa yang akan diukur di dalam penelitian (Budiastuti dan Bandur 2018). Menurut Patton, reliabilitas adalah suatu faktor yang menjadi penting untuk dipertimbangkan di dalam penelitian dan tidak dapat dipisahkan dari validitas (Budiastuti and Bandur 2018). Uji Regresi adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan hubungan antar variable yang akan diuji satu sama lain (Vista Yuliantika 2018). Menurut Ridwan dan Sunarto, uji hipotesa dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut diterima atau ditolak (Willy Arif Indhaka, Eko Suprptoно 2017).